

Bab I

Telisik Emik Sensus Pertanian: Memaknai Data Sebelas Lokus di Sumatra

Reza Amarta Prayoga & Badrun Susantyo

A. Merangkai Pendataan Emik Sensus Pertanian 2023

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Hampir tiap pulau di Indonesia mempunyai flora dan fauna yang beragam. Salah satunya adalah Pulau Sumatra. Pulau ini terdiri dari sepuluh provinsi, yang terbentang mulai dari Aceh hingga Lampung. Dalam penelusuran sejarah, Pulau Sumatra disebut juga sebagai *Suwarnadwipa* (dalam Bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas) atau *Suwarnabhumi* (dalam Bahasa Sanskerta berarti Tanah Emas). Istilah-istilah tersebut digunakan dalam naskah-naskah kuno dari India yang banyak ditulis pada era sebelum Masehi.

Pulau Sumatra juga terkenal akan kekayaan dan keanekaragaman hayatinya. Hampir setiap wilayah Pulau Sumatra memiliki kekhasan flora dan fauna yang beragam dengan ciri khusus tersendiri. Keaneka-

R. A. Prayoga & B. Susantyo

Universitas Indonesia & Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: reza010@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Prayoga, R. A. & Susantyo, B. (2025). Telisik emik sensus pertanian: Memaknai data sebelas lokus di Sumatra. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 1–17). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.934.c940 E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ragaman ini terkait erat dengan jenis dan kondisi iklim serta bentang alam yang berbeda, yang mengakibatkan hadirnya kekhasan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena kekayaan alam dan letak geografis dari Pulau Sumatra yang strategis, banyak pihak asing untuk yang datang ke sana. Menurut catatan sejarah, Pulau Sumatra merupakan pintu masuk bagi kaum pendatang ke wilayah Nusantara. Mulanya, para pendatang ini singgah untuk urusan dagang dan penyebaran agama. Namun, kemudian berkembang menjadi persoalan kolonialisme wilayah.

Pulau Sumatra adalah pulau besar di sebelah barat Nusantara. Jajaran bentang dari pangkal Provinsi Aceh hingga ujung Provinsi Lampung menyiratkan pelbagai potensi pertanian yang luar biasa. Pulau Sumatra menjadi salah satu lumbung komoditas unggulan sektor pertanian, seperti perkebunan yang menjadi komoditas andalan, tanaman pangan, dan hortikultura, serta ditopang sokongan dari subsektor peternakan dan perikanan (Iyan, 2014). Tidak mengherankan, dengan potensi besar dari hasil pertanian, Pulau Sumatra ikut berperan dalam membantu ketahanan pangan dunia (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2017). Tidak hanya itu, dalam rilis Badan Pusat Statistik Jambi (BPS Jambi, 2022), tercatat bahwa Pulau Sumatra sangat terdepan dalam menyumbang hasil perkebunan secara nasional, yakni kelapa sawit sebesar 24,4 juta ton (53% produksi nasional), karet 2,2 juta (70% produksi nasional), kelapa 722 ribu ton (25% produksi nasional), dan kopi 374 ribu ton (48% produksi nasional). Tidak mengherankan jika dari dulu kala hingga saat ini, Pulau Sumatra layak disebut sebagai salah satu nirwana untuk hasil bumi di Nusantara.

Hasil produksi pertanian yang begitu besar dari Pulau Sumatra menjadi sebuah momentum pendataan bagi BPS. Pendataan melalui Sensus Pertanian oleh BPS menjadi agenda rutin dasawarsa pada setiap tahun yang berakhir angka tiga (Badan Pusat Statistik [BPS], 2012). Hal ini dilakukan untuk dapat mencatat pertanian Indonesia demi mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Pendataan sensus pertanian yang berbasis survei kuantitatif dilakukan melalui

langkah kolektif dalam penyediaan data pertanian nasional. Sensus pertanian menjadi strategi implementasi kebijakan makro dalam perencanaan, perancangan kebijakan, dan evaluasi program pertanian nasional. Proses pencatatan data secara survei juga perlu didukung penyertaan data kualitatif untuk memberikan gambaran utuh atas realitas pertanian Indonesia sesungguhnya. Pencatatan sensus pertanian dengan pendekatan kualitatif yang digali dan dimaknai secara emik dapat menjadi suplemen penguat penyediaan data pertanian yang konstruktif dan komprehensif.

Proses pemaknaan data dari sudut pandang subjek yang diteliti (petani) ditambah cerita haling-rintang petugas pendata menjadi kekuatan untuk membongkar sudut emik dari pendataan Sensus Pertanian 2023. Sudut pandang subjek yang diteliti, yakni informan petani menjadi basis episentrum analisis emik sensus pertanian pada sebelas lokus di Pulau Sumatra. Sebelas lokus yang dijadikan basis pengumpulan data adalah Kabupaten Aceh Besar (Provinsi Aceh), Kabupaten Karo (Provinsi Sumatra Utara), Kabupaten Bintan (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau), Kabupaten Solok (Provinsi Sumatra Barat), Kabupaten Batang Hari (Provinsi Jambi), Kabupaten Bengkulu Utara (Provinsi Bengkulu), Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatra Selatan), Kabupaten Bangka Tengah (Provinsi Bangka Belitung), serta Kabupaten Lampung Utara (Provinsi Lampung). Kesebelas lokus ini ditentukan melalui beberapa pertimbangan secara *purposive*, yakni basis komoditas unggulan sektor pertanian (Iyan, 2014); masifnya peralihan fungsi lahan pertanian (Wulandari & Kemala, 2017); maraknya penyempitan lahan pertanian (Aprildahani et al., 2021); isu kemiskinan, kesejahteraan, dan marginalisasi akses modal pada petani (Fadhli, 2022; Rejeki, 2019); isu disparitas implementasi SDGs dan ketahanan pangan (Erwandari, 2017); konflik manusia dan satwa liar (Sukmantoro, 2019); serta konflik ekonomi petani dan agraria (Sauni, 2016; Sinaga & Adi, 2020). Pertimbangan tersebut menjadi penguat kontekstual dari kesebelas lokus, ditambah dengan kontekstual lokal permasalahan dari setiap lokus yang terurai dalam tiap bab di

buku ini. Selain itu, informan yang emiknya dicatat, tidak terbatas oleh gender, etnik, dan usia. Artinya, suara semua kalangan dapat terakomodasi lewat informan yang terdokumentasi dalam buku ini.

Para penulis menjadikan kesebelas lokus di Pulau Sumatra sebagai “ladang” data, yang terungkap dalam narasi setiap bab dalam buku ini. Tiap lokus memiliki fokus permasalahan dan kondisi yang unik, dan menjadi sumber penggalian data emik Sensus Pertanian 2023. Misalnya, Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu sentra pertanian rakyat komoditas Pinang; Kabupaten Karo merupakan sentra produksi komoditas jeruk dan menjadi pertanian rakyat jeruk dalam skala perkebunan besar; Kabupaten Bintan disesaki masifnya praktik model pertanian hortikultura yang menjadi basis ekonomi perdesaan; Kabupaten Pelalawan tersandung persoalan integrasi peternakan di tengah perkebunan sawit; Kabupaten Batang Hari dihadapkan pada isu sawitisasi dan nasib perkebunan karet rakyat yang kian nelangsa; Kabupaten Bengkulu Utara terkait polemik integrasi tata kelola peternakan dan perkebunan; Kabupaten Ogan Ilir menyoal daya dukung pertanian berkelanjutan; Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami isu pertanian di tengah gelanggang *Food Estate* (FE) padi; Kabupaten Solok berada pada situasi krisis sektor pertanian terong belanda; Kabupaten Lampung Utara terjebak di pusaran kerentanan dan ketidakberdayaan petani ubi kayu atas gempuran pasar pertanian; serta Kabupaten Bangka Tengah berada pada krisis pertanian lada putih sebagai pilar ekonomi yang berkelanjutan.

Penulis dari tiap lokus berusaha mengungkit dan membongkar realitas emik yang belum tertangkap dari perangkat kuesioner sensus pertanian yang dipegang oleh petugas pendata. Hal inilah yang menjadi tawaran kekuatan narasi emik dari proses pendataan Sensus Pertanian 2023. Penulis dengan pelbagai perspektifnya berusaha mengelaborasi konsep dan temuan realitas emik dari yang sudut berbeda dari kuesioner sensus pertanian. Tangkapan emik setiap penulis dari sensus pertanian ini dinarasikan sebagai data empiris. Temuan emik ini kemudian didekati dengan pelbagai konsep sebagai dasar “navigasi pikir” para penulis untuk membongkar realitas emik

dari sensus pertanian. Hasilnya, ada begitu banyak konsep yang terurai dalam narasi setiap bab dalam buku, yakni konsep perkebunan rakyat, ketimpangan dalam mata rantai produksi, revolusi hijau yang mendegradasi lingkungan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi, praktik pertanian berkelanjutan, transformasi pertanian, strategi sumber penghidupan petani, integrasi perkebunan dan kelapa sawit, sawitisasi, stressor relasi kuasa secara sosiologis antara tauke dan petani karet, kerja kolektif dalam pertanian berkelanjutan, strategi akomodasi komunikasi antara pendata dan responden, integrasi peternakan dan perkebunan, *food estate* dan optimalisasi sawah, adaptasi dan mitigasi, serta respon petani dalam perubahan iklim. Seluruh konsep tersebut tumpah dalam narasi yang teruntai dalam tiap bab.

Sebelas lokus ini ditransmisikan menjadi ekstraksi “buah pikir” dari setiap penulis yang dituangkan dalam narasi emik. Para penulis kemudian mencoba meneropong dan membongkar sisi yang tidak tertangkap dalam kuesioner sensus pertanian. Ulasan pemaknaan emik dari sebelas lokus ini meliputi, **pertama**, pemaknaan emik dari pangkal Sumatra yang melihat realitas pertanian dari potret pertanian buah pinang di tanah Aceh. Pinang dipandang oleh petani memiliki nilai kultur kerja yang begitu terlekat dengan sistem penghidupan dan potensi pinang sebagai “denyut nadi” penggerak ekonomi bagi keluarga petani. Persoalan yang mendera petani pinang di Kabupaten Aceh Besar yang coba dieksplorasi penulis yakni kebanyakan petani masih terperangkap dalam jerat pemodal. Jeratan ini begitu kuat karena ia telah menguasai jalur perniagaan, yang membuat daya tawar petani atas harga pinang menjadi inferior. Hal ini terjadi tidak lepas dari absen dan melemahnya lembaga petani yang tidak cukup kuat memproteksi harga pinang di tingkat petani. Akhirnya, petani tunduk pada penetapan harga pinang dari pemodal.

Kedua, turun sedikit ke Kabupaten Karo di Provinsi Sumatra Utara, penulis berhasil menangkap realitas terpuruknya petani jeruk. Komoditas jeruk yang menjadi unggulan dan strategis senyatanya tidak mampu mengangkat derajat hidup petani jeruk di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, dan Desa Barung Kersap, Kecamatan

Munte di Kabupaten Karo. Potret petani jeruk dalam agenda sensus pertanian mencoba memaknai dinamika dan esensi terpuruknya petani jeruk dalam sepuluh tahun terakhir. Serangan hama lalat buah juga membuat petani jeruk makin terpuruk tanpa kepastian. Jaminan pemerintah setempat atas keberlangsungan pertanian jeruk di Karo masih dirasa oleh petani belum optimal sebagai pengaman penghidupan bagi petani jeruk. Namun, di balik keterpurukan itu, masih terdapat harapan “masa depan cerah” bagi petani bahwa jeruk dirasa sebagai komoditas yang potensial dan menguntungkan.

Ketiga, beranjak ke timur Sumatra, tepatnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sensus pertanian dalam penangkapan empiris menarasikan realitas emik berupa pertanian hortikultura untuk kemandirian pangan. Sentra perkebunan sayur-mayur skala rumah tangga menjadi basis sumber penghidupan dan penggerak roda ekonomi di tingkat desa. Kemandirian pangan di tingkat desa menjadi basis sumber penghidupan berkelanjutan. Diversifikasi sumber penghidupan dengan pertanian hortikultura melalui penanaman hidroponik dirasa sebagai penyelamat dalam memenuhi kebutuhan subsisten di rumah tangga petani.

Keempat, tangkapan emik penulis juga dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menjadi basis dalam penggalian data sensus pertanian. Hal yang berhasil dipotret oleh penulis terkait sensus pertanian adalah kelapa sawit dan peternakan sapi. Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu perkebunan sawit terbesar di Provinsi Riau perlu melakukan langkah integrasi pemeliharaan sapi dengan perkebunan sawit. Selain memperoleh hasil dari sawit, petani dapat mendongkrak potensi sumber penghidupannya dengan beternak sapi. Limbah kelapa sawit dapat menjadi sumber alternatif pakan sapi. Jika integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi diimplementasikan, Kabupaten Pelalawan dapat menjadi lumbung sapi nasional.

Kelima, pemaknaan emik sensus pertanian lainnya adalah nasib suram petani karet akibat impitan masif sawitisasi di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Penulis menyoroti nasib karet rakyat yang makin

tergerus lahannya akibat gerakan masif petani yang mengonversi karet ke sawit. Ekstraksi realitas emik yang disajikan penulis melalui pemaknaan mendalam dapat mengungkapkan fakta bahwa persoalan sawitisasi secara ekologis dan sosial ekonomi menjadi dua hal yang berkelindan dalam keterpurukan perkebunan karet rakyat. Kebun karet rakyat di Batang Hari saat ini berada pada titik “kulminasi” dari kelangkaan karet akibat sawitisasi. Hal ini tidak terlepas dari tekanan harga karet di titik termurah yang membuat petani karet berkonversi menjadi petani sawit. Persoalan kesejahteraan menjadi gerak masif bagi petani secara kolektif mengonversi lahan karet menjadi sawit. Rasionalitas ekonomi “untung-rugi” menjadi pemicu petani mendisfungsionalkan lahan karet. Lemahnya proteksi harga karet dan permainan harga yang dilakukan para tauke semakin menegaskan kelangkaan karet dan makin memburamkan masa depan karet rakyat di Kabupaten Batang Hari.

Keenam, bergeser sedikit ke Kabupaten Bengkulu Utara, pemaknaan emik sensus pertanian berupa persoalan integrasi peternakan dan perkebunan. Gerak petani yang mengombinasikan pertanian dan peternakan menjadi potensi sebagai alternatif sumber penghidupan bagi petani. Perkebunan yang diletakkan dalam rasional ekonomi sebagai sumber pendapatan utama dan peternakan sebagai investasi jangka panjang dapat berkelindan dalam menunjang kehidupan rumah tangga petani. Rasional ekonomi yang mengombinasikan perkebunan dan peternakan sebagai langkah tindakan rasional strategis untuk petani. Dukungan pranata struktural seperti pemerintah daerah hingga desa, dan kelompok pertanian dapat memfasilitasi upaya integrasi peternakan dan perkebunan melalui pelatihan bagi petani.

Ketujuh, potensi dan tantangan sensus pertanian juga terpotret di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan. Potret emik yang disajikan berupa persoalan kompleks pertanian, yakni kendala petani skala kecil, keterbatasan lahan, risiko gagal panen, alih fungsi, dan pola tanam yang tergantung pada cuaca. Elaborasi persoalan yang dihadapi oleh petani ini menawarkan pelbagai solusi, yaitu dukungan pembiayaan modal, proteksi pemerintah, asistensi pengetahuan perta-

nian, kepastian hukum untuk melindungi petani, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu, sensus pertanian dianggap sebagai langkah tepat untuk penyediaan data dalam merancang, merencanakan, dan menerapkan program atau kebijakan untuk pengembangan pertanian. Tidak hanya itu, solusi dengan penguatan *human capital* petani berbasis teknologi juga diharapkan dapat tumbuh untuk pertanian berkelanjutan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

Kedelapan, masih dalam provinsi yang sama, ditemukan isu situasi petani di tengah pengembangan *food estate* di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pengembangan *food estate* (FE) padi di Kabupaten OKI mengungkapkan bahwa program perencanaan FE masih belum dipahami oleh sebagian besar petani yang menjadi aktor utama program tersebut. Disfungsionalnya pranata kelompok tani sebagai “corong” komunikasi di tingkat petani menjadikan FE seolah istilah yang terdengar asing bagi para petani. Penerapan FE tanpa studi mendalam terkait kekuatan sumber daya alam, kapasitas sosial ekonomi petani, dan pranata pendukungnya, menjadikan FE akan menghadapi persoalan diskontinuitas FE. Tidak dapat dipungkiri, FE akan menjadi “artefak pembangunan” yang gagal diterapkan di masyarakat akibat tidak adanya pertimbangan kultur sosial, kapasitas sumber daya alam, dan pranata pendukung yang ada pada masyarakat tempatan.

Kesembilan, sedikit menanjak di Provinsi Sumatra Barat, tepatnya di Kabupaten Solok. Pemaknaan emik dari Sensus Pertanian 2023 ini secara khusus menyoroti pertanian hortikultura. Pendalaman emik ini mampu memotret potensi pertanian terong belanda dan agrowisata. Bentang geografis alam Kabupaten Solok sudah menjadi modal untuk pengembangan kawasan agrowisata. Pertanian hortikultura berbasis pengembangan pariwisata agro menjadi potensi pendapatan daerah. Selain itu, pengembangan pertanian hortikultura seperti terong belanda belum menjadi tanaman pokok dan komersial, padahal jika terong belanda menjadi tanaman yang dikomersialkan, tentunya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di

Kabupaten Solok. Di sisi lainnya, pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Solok menjadi data emik tersendiri, yakni belum ada pemahaman konteks lokal (sosial ekonomi, kultur, geografis, dan budaya tempatan) bagi pelaksana sensus pertanian di Kabupaten Solok. Hal ini mengakibatkan pertanyaan terkait isu-isu relevan terkait pertanian setempat belum terungkap akibat keterbatasan pertanyaan survei. Selanjutnya, pertanyaan pada kuesioner masih perlu diadaptasi dengan kebutuhan dan realitas lokal agar isu-isu spesifik pertanian dapat tergambar dalam konteks lokal. Terakhir, pentingnya kolaborasi dengan komunitas lokal dalam pendampingan petugas sensus terkait etika dan teknik pengumpulan data dalam menerjemahkan sensus pertanian ke tingkat lokal.

Kesepuluh, pemaknaan emik sensus pertanian dapat mengungkapkan ketidakberdayaan petani ubi kayu di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Adanya anggapan ubi kayu sebagai komoditas inferior menyebabkan program pemerintah terkait pengembangan ubi kayu kurang menjadi perhatian bagi petani. Selain itu, distribusi pupuk subsidi yang tidak merata pada petani ubi kayu membuat petani harus berkorban lebih dengan membeli pupuk non-subsidi yang harganya begitu tinggi. Temuan emik dari petani ubi kayu di lokus ini juga menyoroti ketidakberdayaan petani dalam menentukan harga akibat tekanan kuat dari pabrik. Harga dikendalikan oleh pabrik dan petani seakan tidak memiliki daya tawar untuk mengintervensi harga. Ditambah lagi, kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani ubi kayu, penyuluh pertanian dianggap “lepas tangan” dan kurang memperhatikan pengembangan komoditas ubi kayu di petani.

Kesebelas, sedikit menyeberang ke sebelah pantai timur pulau Sumatra. Tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Pendalaman emik yang berhasil diungkap dalam bab ini, yaitu kompleksitas pertanian lada putih. Berdasarkan pengungkapan emik dari sensus pertanian, ada dua persoalan yang melanda pertanian lada putih di Bangka Belitung. *Pertama* ialah hambatan struktural, yakni ketidakberpihakan pemerintah dalam memberikan akses pasar pada petani lada putih. Langkah proteksi pemerintah kepada petani

masih dirasa kurang akibat praktik monopoli jalur niaga dari pemodal besar. *Kedua*, hambatan sosiokultural, yakni keterbatasan *human capital* terkait penguasaan dan adopsi teknologi modern membuat petani terhambat dalam peningkatan daya saing usaha, ditambah akses pendidikan pertanian bagi rumah tangga petani masih sulit dijangkau. Sensus pertanian ini dirasakan sebagian petani lada putih sebagai pembuka wawasan untuk keberlanjutan pertanian. Sensus pertanian bagi petani dapat membuka data untuk implementasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada petani lada putih, sekaligus untuk memperkuat pertanian lada putih sebagai pilar ekonomi rumah tangga petani.

B. Pemaknaan Emik Sensus Pertanian: Menyusuri Paradoks Survei Kuantitatif

Operasional penggalian kualitatif emik sensus pertanian secara *verstehen* (Hitzler & Keller, 1989; Shields, 1996) senyatanya dilakukan dalam penelitian ini untuk dapat memotret realitas secara mendalam, dipadukan dengan interpretasi dari suatu tafsiran pendataan survei sensus pertanian. Hal ini dilakukan sebagai data penguat berupa emik dari tafsiran realitas secara kualitatif yang *verstehen* (mendalam) dibalik pertanyaan atas jawaban survei yang cenderung kuantitatif (Berkovich, 2018; Seixas et al., 2018; Shields, 1996). Interpretasi ini kemudian menjadi postulat atas realitas emik yang ada pada pendataan survei sebagai penguat penggalian secara mendalam pada pendataan sensus pertanian. Selain itu, data jawaban survei sensus pertanian seolah dapat berdiskursif memadatkan penggalian interpretatif emik. Penggalian ini tidak hanya menangkap jawaban yang dibatasi oleh survei, tetapi mampu memotret konteks pelampauan tafsiran realitas sosial atas jawaban secara utuh dari survei sensus pertanian yang hanya berdasar angka ke sebuah narasi mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi pelengkap dalam survei kuantitatif sensus pertanian.

Agustini (2020) dan Chairuddin et al. (2021) menegaskan dalam temuannya bahwa masih terjadi paradoks pada polemik angka dalam

data, atau tidak adanya kesatuan data antar-lembaga pemerintah. Akibatnya, muncul perang data yang valid dan sah di pelbagai tingkatan perangkat pemerintah yang berujung pada penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Contohnya ialah pada kasus carut-marut dan tidak terintegrasinya penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 yang masih terjebak pada permasalahan ambiguitas dan validitas data di tiap kementerian (Rahmansyah et al., 2020). Eksistensi dan gebrakan dari sensus pertanian menjadi saluran kuratif dari tumpang tindih data, satu data program pertanian dan kesejahteraan petani. Penarasian emik sensus pertanian dengan mencatat pertanian Indonesia menawarkan solusi paripurna persoalan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

Sensus pertanian ini juga menjadi corong pemastian status rumah tangga petani dan penyaluran bantuan subsidi pertanian agar tepat sasaran. Seperti diketahui, ketika Covid-19 melanda, banyak sekali kendala penyaluran bantuan subsidi yang tidak tepat sasaran akibat data penerima bantuan yang tidak terintegrasi (Rahmansyah et al., 2020; Tuwu, 2020). Selain itu, kendala lainnya adalah banyak orang yang seharusnya berhak untuk menyandang status rumah tangga petani miskin malah di-*preteli* (dilucuti satu-persatu) oleh oknum-oknum perangkat desa yang memanipulasi. Atau lebih parah lagi, hanya lingkaran keluarganya saja yang dijadikan penadah bantuan, yang sejatinya tidak layak untuk mereka terima. Lingkaran elite kecil setingkat desa dengan secuil kuasa legitimasinya dapat bebas memanipulasi data bantuan bagi petani. Oleh karena itu, tak pelak transaksi data di tingkat terkecil seperti desa dapat memainkan narasi bantuan pemerintah hanya untuk keuntungan segelintir ikatan jaringan mereka.

Salah satu pemastian status rumah tangga petani ini dapat dilakukan melalui *geotagging* dalam aplikasi perangkat lunak Wilkerstat. Aplikasi ini menjadi saluran validasi data untuk mengetahui secara riil potret kondisi pertanian hingga “akar rumput” di masyarakat. Gambar-gambar yang diunggah oleh petugas PPL menjadi pembuka informasi sah atas realitas kondisi pertanian. Di samping itu, untuk

meminimalisasi paradoks data kuantitatif yang cenderung dapat dimanipulasi, dilakukan juga pencatatan secara emik dari sumber data, yaitu informan rumah tangga petani untuk memastikan kembali “status” mereka dari pendataan sensus pertanian yang dilakukan PPL. Penarasian emik ini yang menjadi data komplementer proses pendataan dari PPL, guna melengkapi realitas yang belum utuh tertangkap dan diungkapkan dari ekspose jawaban kuesioner sensus pertanian.

Perspektif emik menjadi kurasi ketidakpaduan dan anomali data yang diproduksi dalam proses pendataan sensus pertanian. Proses produksi data kesejahteraan petani dari pemerintah yang tidak terintegrasi memang selama ini rawan dan rentan akan manipulasi, ketidakpaduan bantuan sosial, penyelewengan, hingga distorsi data (Agustini, 2020; Chairuddin et al., 2021; Rahmansyah et al., 2020; Tuwu, 2020). Perspektif emik ini menjadi penengah yang dapat merefleksikan suatu tafsiran atas realitas secara mendalam dari penggalan interpretatif subjek data (Darling, 2016; Jackson & Niblo, 2003; Olive, 2014). Proses produksi data dengan pelibatan perspektif emik dapat mengungkapkan realitas mendalam pada kesejahteraan petani yang masih cukup jarang dalam riset-riset aksiologi. Sementara itu, pengungkapan makna eksplorasi mendalam dari suatu realitas sosial dalam riset kualitatif yang diekspose secara emik dapat menjadi produksi data komplementer (Fitrah, 2018; Setyawan, 2017).

Perspektif emik yang ditawarkan dalam pendampingan proses pendataan sensus pertanian dalam produksi data dapat menjadi penawar sekelumit kesahihan atas saling klaim data kesejahteraan petani. Emik dari sensus pertanian ini dapat juga sebagai “penangkis narasi data” atas klaim sepihak segelintir oknum yang hanya memanfaatkan informasi kurang valid atas orang-orang yang senyatanya tidak layak diberi bantuan subsidi pertanian dari pemerintah. Aspek pendokumentasian makna dari pembacaan mendalam kuesioner sensus pertanian dengan penggalan emik ini dapat memberikan pandangan dari sisi selisik yang berbeda, yaitu membedah realitas kesejahteraan masyarakat petani terkhusus di Pulau Sumatra. Meminjam pandangan Baudrillard (dalam Scott, 2007, 14–17), ia menyatakan bahwa angka

dapat dimanipulasi, dan angka hanya sederet nominal yang dapat terjebak dalam hiperealitas yang dapat dilebih-lebihkan dari gejala realitas kepalsuan gambar, angka, ataupun teks (Mantra, 2012; Piliang, 2015; Wardhana, 2022). Perspektif emik ini dapat memberikan pene-
kanaan dan pengungkapan atas kepalsuan dari produksi data dengan
penjabaran makna kebenaran dari suatu realitas. Penggalan produksi
data kesejahteraan petani dari proses emik sensus pertanian inilah
yang menjadi solusi dari penawar kepalsuan. Sayangnya, kelemahan
ketidakpaduan dan ketidaksatuan data dapat terkurasi dari program
satu data yang mencatat pertanian Indonesia demi kedaulatan pangan
dan kesejahteraan petani. Akhirnya, kita sama berharap agar “pen-
dampingan” dalam penyelenggaraan Sensus Pertanian 2023 ini dapat
memberikan angin segar dalam meningkatkan kesahihan data yang
dihimpun dari masing-masing lokusnya, khususnya pada sebelas
lokasi terpilih sebagaimana tersaji dalam setiap babnya dalam buku
ini.

C. Penutup: Sebuah Pemaknaan Emik Sensus Pertanian

Pemaknaan emik Sensus Pertanian 2023 yang diangkat dari sudut
pandang petani dan dinarasikan dengan benturan pelbagai perspektif
dari setiap bab buku ini membuat temuan lapangan menjadi dinamis.
Kedinamisan temuan ini menjadi corak setiap lokus di Pulau Sumatra
yang membahas pelbagai komoditas pertanian ditambah sekelumit
persoalan yang kontekstual lokal dihadapi para petani. Tidak hanya
suara petani, para penulis juga menangkap cerita-cerita halang rintang
pendata dalam mencatat pertanian Indonesia.

Perpaduan aspek kuantitatif yang dibawa oleh para pendata
sensus pertanian dan aspek kualitatif yang digunakan oleh penulis
dari setiap bab menjadi penguat produksi data dengan penjabaran
makna kebenaran dari realitas sensus pertanian itu sendiri. Penggalan
produksi data kesejahteraan petani dari proses olahan emik sensus
pertanian menjadi penawar dan pelengkap pendataan. Kompilasi
konseptual dari ulasan tiap bab buku ini menjadi navigasi pikir dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

merangkai realitas yang disuarakan oleh petani di sebelas lokus Pulau Sumatra. Pelbagai komoditas yang dikontekstualkan dengan persoalan lokalitas petani juga menjadi penguatan narasi emik dalam buku ini. Selain itu, sebagian besar suara petani yang tertangkap dalam pendataan sensus pertanian belum mencerminkan situasional nyata di lapangan, dan emik menjadi penawar untuk memaknai sudut pandang riil petani atas situasional yang dialaminya. Temuan lapangan dari kontemplasi penulis setiap bab buku ini memberikan pengayaan perspektif bahwa melalui Sensus Pertanian 2023, petani di Pulau Sumatra menggantungkan sebuah harapan besar, yakni harapan keberpihakan pada mereka untuk penggapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Daftar Pustaka

- Agustini, P. (2020, January). *Peraturan Presiden Satu Data Indonesia (SDI)*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-presiden-satu-data-indonesia-sdi/>
- Aprildahani, B. R., Permana, C. T. H., & Utama, S. T. E. W. (2021). Kebutuhan lahan pertanian minimum untuk kesejahteraan petani di Pulau Sumatera. *Journal of Science and Applicative Technology*, 5(1), 116–125. <https://doi.org/10.35472/jsat.v5i1.409>
- Badan Pusat Statistik. (2012, 29 Mei). *Sensus pertanian 2013 (ST2013)*. <https://www.bps.go.id/news/2012/05/29/7/sensus-pertanian-2013--st2013-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2022, 10 Agustus). *Perkebunan masih jadi andalan*. <https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/10/237/perkebunan-masih-jadi-andalan.html>
- Berkovich, I. (2018). Beyond qualitative/quantitative structuralism: The positivist qualitative research and the paradigmatic disclaimer. *Quality & Quantity*, 52(5), 2063–2077. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0607-3>
- Chairuddin, C., Suryana, N., & Wicaksono, H. (2021). Dukungan sistem informasi geografis untuk pendataan bantuan sosial berbasis masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Adopsi Teknologi (INOTEK)*, 1(1), 147–158. <https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/inotek/article/view/115>

- Darling, F. (2016). Outsider indigenous research: Dancing the tightrope between etic and emic perspectives. *Forum: Qualitative Social Research*, 17(3). <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/2538/4016?inline=1>
- Erwandari, N. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau. *Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 875–888. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2320>
- Fadhli, P. D. (2022). *Peluang petani dan rumah tangga miskin terhadap penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Pulau Sumatera* [Unpublished thesis, Universitas Andalas]. Andalas University Scholar. <http://scholar.unand.ac.id/98947/>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Jejak Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. (2017, 17 April). *Pulau Sumatera feeding the world dan reforestasi melalui kebun sawit*. <https://gapki.id/news/2017/04/17/pulau-sumatera-feeding-world-dan-reforestasi-melalui-kebun-sawit/>
- Hitzler, R., & Keller, R. (1989). On sociological and common-sense verstehen. *Current Sociology*, 37(1), 91–101. <https://doi.org/10.1177/001139289037001010>
- Iyan, R. (2014). Analisis komoditas unggulan sektor pertanian di wilayah Sumatera. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Pembangunan*, 4(11), 215–235. <https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/2412>
- Jackson, M., & Niblo, D. (2003). The role of qualitative methodology in cross-cultural research. *Qualitative Research Journal*, 3(1), 18–27. <http://www.aqr.org.au/docs/journals/1AQR2003.pdf>
- Mantra, D. (2012, April 13). Hiper-realitas perekonomian nasional. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2012/04/13/02503211/hiper-realitas.perekonomian.nasional?page=all>
- Olive, J. L. (2014). Reflecting on the tensions between emic and etic perspectives in life history research: Lessons learned. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 15(2). <https://doi.org/10.17169/fqs-15.2.2072>
- Piliang, Y. A. (2015). Uang dan hiper-realitas: Sirkulasi modal dan jagad raya moneter. *Extension Course Filsafat (ECF)*, 0(1), Article 1987. <https://doi.org/10.26593/ecf.v0i1.1987>

- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. T. S. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rejeki, S. (2019). Pilihan rasional petani miskin pada musim paceklik. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(2), 195–207. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/32128/27709>
- Sauni, H. (2016). Konflik penguasaan tanah perkebunan. *University of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 45–67. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.45-67>
- Scott, J. (Ed.). (2007). *Fifty key sociologists: The contemporary theorists*. Routledge
- Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2018). The qualitative descriptive approach in international comparative studies: using online qualitative surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778–781. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142>
- Setyawan, F. E. B. (2017). *Pengantar metodologi penelitian: Statistika praktis*. Zifatama Jawara. <https://books.google.co.id/books?id=s5uWDwAAQBAJ>
- Shields, R. (1996). Meeting or mis-meeting? The dialogical challenge to verstehen. *The British Journal of Sociology*, 47(2), 275–294. <https://doi.org/10.2307/591727>
- Sinaga, R. P. K., & Adi, I. R. (2020). Kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria (Studi pada anggota Serikat Petani Indonesia). *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), 72–83. <https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1009>
- Sukmantoro, Y. W. (2019). *Optimalisasi ruang dan sumber daya bagi gajah sumatera dan manusia di lanskap sumatera bagian tengah* [Disertasi, IPB University]. IPB University Scientific Repository. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98235>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Wardhana, A. A. N. A. S. (2022). Hiperrealitas dalam permainan video daring: Simulasi, simulakra, dan hiperrealitas Garena Free Fire. *PERSPEKTIF*, 11(2), 607–614. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6011>

Wulandari, S. A., & Kemala, N. (2017). Kajian komoditas unggulan sub-sektor perkebunan di provinsi jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 134–141. <https://repository.unja.ac.id/34929/>

Buku ini tidak diperjualbelikan.